

KEKUATAN POLITIK KOMUNITAS TOWANI TOLOTANG PADA KONTESTASI PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SIDRAP 2024



A.HASRAN HENGKY
E041171509



DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

SKRIPSI

**Kekuatan Politik Komunitas Towani Tolotang Pada Kontestasi Pemilihan
DPRD Kabupaten
Sidrap 2024**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

**A.HASRAN HENGKY
E041171509**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**KEKUATAN POLITIK KOMUNITAS TOWANI TOLOTANG PADA
KONTESTASI PEMILIHAN DPRD KABUPATEN
SIDRAP 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

A. HASRAN HANGKY

E041171509

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KEKUATAN POLITIK KOMUNITAS TOWANI TOLOTANG
PADA KONTESTASI PEMILIHAN DPRD KABUPATEN
SIDRAP 2024

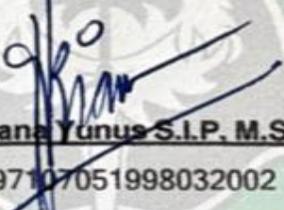
Disusun dan Diajukan Oleh:

A. HASRAN HANGKY

E041171509

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Mei 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

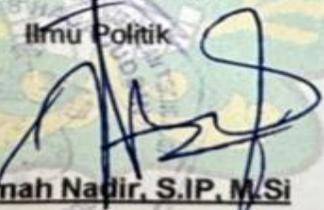
Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Ariana Yunus S.I.P., M.Si

NIP 197107051998032002

Mengetahui,

Ketua Departemen
Ilmu Politik


Dr. Sakmah Nadir, S.I.P., M.Si

NIP 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
KEKUATAN POLITIK KOMUNITAS TOWANITOLOTANG PADA KONTESTASI
PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SIDRAP 2024

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. HASRAN HANGKY

E041171509

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi Pada
Departamen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, pada 31 juli 2024

UNIVERSITAS HASANUDDIN

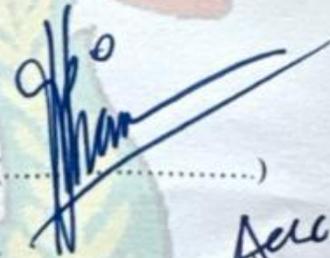
Menyetujui,

Panitia Ujian

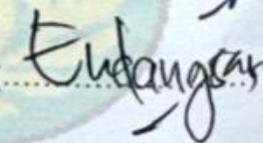
Ketua : Dr. Ariana Yunus, S.Pi, M.Si. (.....)

Anggota : A. Naharuddin, M.Si (.....)

Anggota : Endang Sari, S.P., M.Si (.....)



Alec



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.Hasran Hangky
NIM : E041171509
Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Kekuatan politik komunitas towani tolotang pada kontestasi pemilihan calon DPRD kabupaten Sidrap" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 JULI 2024 Yang



A.HASRAN HENGKY

ABSTRAK

Andi Hasran Hengky , E041171509. Kekuatan Politik Komunitas Tolotang pada Kontestasi Pemilihan DPRD Kabupaten Sidrap 2024. Di bawah Bimbingan Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si dan Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana modalitas yang dimiliki dimanfaatkan sebagai kekuatan politik oleh komunitas towani tolotong pada kontestasi pemilihan DPRD di kabupaten Sidrap tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan di ampapita kecamatan tellu limpoe, kabupaten Sidenreng Rappang atau dikenal Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga bulan dengan rentan waktu bulan february-mei 2024. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian yaitu Wawancara Mendalam, Observasi Partisipasi, dan studi kepustakaan.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Jenis data terdiri dari data Primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan Sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau penunjang apabila dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi dan literatur, baik berupa laporan penelitian, artikel maupun dokumen-dokumen, baik bersumber dari buku-buku, artikel lain yang memiliki relevansi dengan substansi penelitian.

Dalam Konteks Demokrasi Pemilihan langsung merupakan bagian dari transformasi politik yang meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam menentukan siapa sesungguhnya yang menjadi pemerintah sesuai dengan kehendaknya jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa dalam demokrasi dengan sistem pemilihan langsung banyak hal yang perlu di persiapkan salah satunya dengan maju sebagai calon anggota legislatif di tahun 2024 di Kabupaten Sidrap yang dimana bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya konstestasi tersebut calon legislatif yang berlatar belakang dari sugi bugis dengan sebagai orang yang dituakan di komunitas towani tolotong yang dimana kekuatan politik komunitas towani tolotong dengan memanfaatkan modalitas sesuai dengan teori yang diambil oleh peneliti yang terbagi atas 4 akan tetapi hasil dari penelitian tersebut terfokus dengan 2 modal antara lain modal sosial dan modal budaya yang dimana calon tersebut yang berlatar belakang komunitas towani tolotong berhasil menjadi anggota legislatif dengan memanfaatkan 2 modal yaitu modal sosial dengan modal budaya.

Kata kunci : Kekuatan Politik, Towani Tolotong, Kontestasi Politik 2024 Di Kabupaten Sidrap

ABSTRACT

Andi Hasran Hengky, E041171509. The Political Strength of the Tolotang Community in the 2024 Sidrap Regency DPRD Election Contest. Under the Guidance of Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si and Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si

The aim to be achieved in this research is to describe how the modalities they have are used as political power by the Towani Tolotang community in the DPRD election contestation in Sidrap district in 2024. This research was carried out in Amparita, Tellu Limpoe sub-district, Sidenreng Rappang district or known as Sidrap Regency, Sulawesi Province South for three months with a period of February-May 2024. The data collection techniques used in the research are in-depth interviews, participant observation and literature study.

Type of qualitative descriptive research. Data collection techniques were carried out using interview and documentation methods. The type of data consists of Primary data obtained directly in the field and Secondary data obtained indirectly or delivered if necessary. Secondary data was obtained from various references and literature, both in the form of research reports, articles and documents, both sourced from books and other articles that have relevance to the substance of the research.

In the Democratic Context Direct elections are part of political transformation which places the people as an important component in determining who actually becomes the government according to their wishes so it can be concluded in this research that in a democracy with a direct election system there are many things that need to be prepared, one of which is by running as candidates for legislative members in 2024 in Sidrap Regency, from which it can be concluded that there is a contest between legislative candidates who have a Sugi Bugis background and are elders in the Towani Tolotang community, where the political power of the Towani Tolotang community utilizes modalities in accordance with the theory adopted. by comprehensive researchers on 4, but the results of this research focused on 2 capitals, namely social capital and cultural capital, where the candidate with a background in the Towani Tolotang community succeeded in becoming a member of the legislature by utilizing 2 capitals, namely social capital and cultural capital.

Keywords: *Political Power, Towani Tolotang, 2024 Political Contestation in Sidrap Regency*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang hingga saat ini masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Kekuatan politik komunitas towani tolotang pada kontestasi pemilihan calon DPRD kabupaten Sidrap”

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir serta memperluas wawasan. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Penghargaan setinggi tingginya kepada ibunda **A. Risna Wati**, dan ayahanda **Hengky Abdullah**, serta kakak tercinta Nurdin, Juni Arti dan Rahman yang telah mengirimkan doa, dukungan kasih sayang, serta motivasi yang terus mengalir serta kesabaran dan keikhlasan.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak **Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si** selaku pembimbing utama serta bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si** selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan arahan, bimbingan dengan penuh ikhlas dan kesabaran, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memrikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa**, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.
3. Bapak **Drs. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Departemen Ilmu Politik, (Alm.) **Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA; Prof. Dr. Armin, M.Si; Prof Muhammada M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; (Alm) Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin S.IP, M.Si; Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D; A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M,Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, MA; (Alm.) Prof Basir Syam, M.Ag; Imran, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; Dian Ekawaty, S.IP, MA dan Zulhajar, S.IP, M.Si. ix**
5. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik.
6. Kepada seluruh informan penulis yang berada di Kabupaten Sidrap.
7. Teman-teman Ilmu Politik 2017 terima kasih atas kerja sama, bantuan dan dukungan selama menempuh perkuliahan.

8. Kepada himpunan mahasiswa ilmu politik yang juga telah menjadi wadah penulis untuk mengembangkan dan menyalurkan seluruh keluh kesah selama masa perkuliahan.
9. Serta kepada kepada teman-teman Dekrit yang senantiasa memberikan masukan dan arahan untuk kemajuan penulis.
10. Kepada Sahabat saya yang bernama Hartoni dan Nuralam yang selalu hadir dan membirakan motivasi dikala penulis ingin meluapkan rasa kemalasan

Serta kepada seluruh teman teman yang penulis belum sempat tuliskan satu persatu. Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar 10 Mei 2024

penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Modalitas Dalam Kontestasi Pemilu	10
2.1.1 Modal Sosial	14
2.1.2 Modal Budaya.....	19
2.1.3 Modal Politik.....	21
2.1.4 Modal Ekonomi.....	25
2.2 Kekuatan Politik Dalam Pemanfaatan Modalitas.....	27
2.3 Kontestasi	28
2.4 Penelitian Terdahulu (Literatur Review).....	29
2.5 Kerangka Berfikir.....	31
2.6 Skema Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3.1 Data Primer	35
3.3.2 Data Sekunder	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1 Wawancara Mendalam (In Depth Interview).....	36
3.4.2 Observasi Partisipasi	39
3.4.3 Studi Kepustakaan.....	39

3.5 Teknik Analisis Data	39
3.6 Penarikan Kesimpulan.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidrap	41
4.2 Towani Tolotang.....	42
4.3 Nilai-nilai Terdapat di masyarakat Towani Tolotang.....	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Modal Sosial.....	67
5.2 Modal Budaya	71
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran.....	74
6.3 Kontribusi Penelitian	75
LAMPIRAN	76
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi, demokrasi sendiri diartikan sebagai sistem yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam berbagai persoalan. Menurut aturan besar, demokrasi adalah bentuk politik langsung atau tidak langsung dari pemerintahan, mayoritas warga negara ini memilih melalui forum dan memilih mereka secara bebas dan tanpa paksaan. Di Indonesia, pemilihan langsung diadakan. Indonesia menyelenggarakan pemilihan legislatif langsung untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Demokrasi adalah sistem di mana pengambil keputusan kolektif dipilih dan kandidat atau partai politik dapat bersaing secara bebas untuk memenangkan suara rakyat, oleh karena itu, dalam pengertian ini, demokrasi itu sendiri memiliki dua aspek: kompetisi dan partisipasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. UUD 1945 secara jelas mengatur nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional.

Pembatasan kekuasaan negara pada berbagai unsur pemerintahan termasuk dalam konstitusi kita, tetapi di sini kita juga harus melihat akar penyebab dari pembagian kekuasaan negara. Memasukkan lembaga-lembaga negara tingkat tinggi (asas tiga kekuasaan dalam politik),

sehingga kekuasaan lembaga-lembaga negara tersebut secara konstitusional setara, dan menjalankan fungsi dan pengawasannya masing-masing berdasarkan mekanisme (checks and balances) yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pemikiran tersebut, sistem politik yang kita anut dalam pembangunan negara harus menyesuaikan dengan semangat demokrasi konstitusional, untuk memperoleh ketentuan UUD 1945 dalam proses perubahan arah negara.

Di Indonesia, pemilihan umum sangat beragam. Dalam pemilihan umum, presiden dan wakil presiden dipilih, kepala dan wakil presiden gubernur, walikota, atau bupati dipilih, atau wakil rakyat dipilih di pemerintah pusat. Dan sedang diseleksi. Lembaga legislatif di tingkat kabupaten atau yang biasa disebut dengan lembaga legislatif. Sebelum itu yang perlu diketahui bahwa Pemilihan umum (pemilu) diadakan setiap lima (lima) tahun sekali, sekali dipimpin oleh penyelenggara pemilu yaitu Panitia Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara. Pemilihan Umum (DKPP). Lingkungan masyarakat demokratis perlu menguasai dan mengembangkan seni negosiasi yang jujur dan sehat untuk mencapai konsensus yang jujur dan sehat. Konsensus yang dicapai melalui “rekayasa”, manipulasi, atau kesepakatan curang, cacat atau patologis bahkan bisa disebut pengkhianatan nilai dan semangat musyawarah.

Hanya ketika setiap orang atau kelompok dalam diskusi memiliki kemauan psikologis untuk melihat kemungkinan bahwa orang lain benar dan mereka salah, dan semuanya pada dasarnya baik, dengan kecenderungan dan niat baik, baru dapat dilaksanakan. Dan musyawarah yang baik¹.

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.²Pemilu menjadi kontestasi bagi orang-orang untuk menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, sehingga akan terjadi perebutan suara dari hak pemilih secara legal menurut aturan yang berlaku. Pemilihan umum berkaitan dengan 3 hal yaitu peserta pemilu, pemilih, dan penyelenggara pemilihan umum. peserta berusaha memenangkan kontestasi dengan mengerahkan segala kekuatan politik dan potensi yang dimiliki. Pemilih akan menentukan siapa kandidat atau peserta yang memiliki potensi tersebut dan mampu mewakilinya. Sedangkan penyelenggara pemilu sebagai institusi yang menjalankan dan mengatur jalannya pemilihan.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

¹ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, (Malang, 2012)h.8.

² Rumidan Rabi'ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia. (Jakarta: Rajawali, 2009)hal 68.

sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam penelitian ini akan berfokus pada pemilihan perwakilan rakyat tingkat daerah. Pada tingkat daerah kontestasi pemilu lebih menarik dalam mengidentifikasi kekuatan politik lokal yang muncul. Salah satunya adalah kekuatan politik komunitas *towani tolotang*.

Dengan adanya pemilu legeslatif yang perlu diketahui bahwa adanya kontestasi tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kontestasi akan menimbulkan Kompetisi, yang dimana pada arena politik tidak hanya mencakup ruang persaingan antara partai saja namun lebih menonjolkan sosok figurative dari kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitasnya dan moralitas yang tercorak, serta historis latar belakang pendidikan dan pekerjaan apalagi dalam konteks pemilihan desa yang tidak memerlukan dukungan partai. Modal ini juga merupakan sebuah bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang harus dimiliki pasangan calon dengan masyarakat yang nantinya akan memilihnya secara langsung.

Oleh sebab itu bahwa jelas modalitas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, karena saling berkaitan erat satu sama yang lain. Secara definisi konseptual tentunya metafora tersebut tergambar dari tiga modal utama yang harus dimiliki oleh para calon yang nantinya akan mengikuti kontestasi dalam sebuah pemilu. Modalitas dalam kontestasi politik tidak ditentukan figur dan modalitas calon saja, tapi juga di tentukan

peran dukungan. Ketiga dalam kontestasi politik adalah, modal politik (political capital), modal sosial (social capital) dan modal ekonomi (economic capital), ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat politik dalam memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.

Dengan adanya pemilu tersebut Fenomena politik lahir dari berbagai realita sosial yang terjadi ditengah masyarakat terutama di tingkat lokal pada saat pesta demokrasi berlangsung. Kabupaten Sidrap sendiri memiliki beberapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dilihat dari dari satu daerah ke daerah lain bukan hal yang mudah ketika aktor tersebut terjun ke masyarakat walaupun dengan status sebagai orang yang di tuakan di salah satu komunitas. Ini menjadi tantangan yang baru bagi seorang aktor untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat yang seharusnya di nikmati oleh masyarakat itu sendiri. Dan hal tersebut yang paling perlu mendapatkan dukungan suara masyarakat. Daerah Pemilihan dalam hal ini adalah ranah terbentuknya ikatan emosional maupun sosial dalam memperebutkan hati masyarakat, sehingga nantinya bisa memenangkan Pemilihan Legislatif.

Identitas melekat dalam habitus seorang aktor yang tercermin dari hasil konstruksi terkait pengalaman aktor memaknai realitas yang dihadapinya. Kemenangan yang diraih semata-mata bukan karena mendompleng dari eksistensi partainya atau organisasi sosial, melainkan juga kemampuan personal seorang aktor politik yang dapat

mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya. Arena politik adalah tempat pertarungan aktor untuk mendapatkan legitimasi ataupun posisi strategis di pemerintahan yang di dalamnya terdapat modal sebagai penunjang tujuan. Modal sosial sebagai pemahaman dan pengetahuan terhadap komunitas atau kelompok sosial yang memiliki hubungan baik untuk melakukan suatu kegiatan produktif. Modal sosial ini berhubungan kepemilikan pada organisasi - organisasi, struktur, dan hubungan - hubungan sosial antara anggota kelompok, terlepas dari intervensi pemerintah atau pihak lain.

Sehingga Modal sosial terbentuk dari kepercayaan tiap individu dalam jaringan sosial sehingga komitmen yang sudah ada dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan. Modal sosial sangat penting bagi komunitas karena : mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas, menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas, mengembangkan solidaritas, memungkinkan pencapaian bersama, dan membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi (Bobi 2004 : 17) sekaligus dalam hal ini dalam suatu daerah yang masih melekat dengan soal budaya aktor juga bisa mengandalkan modal budaya seperti yang ada di Kabupaten Sidrap yang sudah terjadi pemilu legislatif 2024 modal sosial yang dimiliki aktor dalam ranah pertarungan politik memperjelas bahwa hubungan timbal balik antara anggota organisasi dengan masyarakat dapat menciptakan

kepercayaan dari masyarakat.

Pada tahun 2024 sangat menarik diteliti terkait masyarakat towani tolotang yang berada di Kabupaten Sidrap, yang dimana Towani Tolotang merupakan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Sidenreng Rappang (di Sulawesi Selatan) yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi melalui beberapa jalur; jalur keturunan dan konversi agama.³ Masyarakat To Lotang adalah sekelompok penduduk di kelurahan Amparita, kecamatan Tellu Limpoe. Asal usul orang To Lotang, berasal dari Kabupaten Wajo, yang mengungsi dari daerah asalnya, pada awal abad ke-17 (tahun 1666), karena menolak di Islamkan oleh raja Wajo Arung Matoa (Sangkuru Petta Mulajaji Sultan Abdurrahman). Sedangkan penamaan To Lotang karena kelompok masyarakat ini menetap di sebelah selatan kota Pangkajene kota Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam bahasa Bugis arah selatandisebut dengan istilah Lotang.

Dengan apa yang dibahas sebelumnya maka hal yang menarik dii angkat judul oleh penelitian ini mengenai **“KEKUATAN POLITIK KOMUNITAS TOWANI TOLOTANG PADA KONTESTASI PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SIDRAP 2024”**

³ Hasse J, *Dinamika Hubungan Islam Dan Agama Lokal Di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang Di Sulawesi Selatan*, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, Hal 1

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu, Bagaimana memanfaatkan modalitas yang dimiliki dimanfaatkan sebagai kekuatan politik oleh komunitas towani tolotang pada kontestasi pemilihan DPRD di kabupaten Sidrap tahun 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan terkait kekuatan politik komunitas towani tolotang yang diangkat diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mendeskripsikan Bagaimana modalitas yang dimiliki dimanfaatkan sebagai kekuatan politik oleh komunitas towani tolotang pada kontestasi pemilihan DPRD di kabupaten Sidrap tahun 2024.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat teoritis, mengungkapkan secara ilmiah terkait kekuatan politik aktor dan kelompok komunitas tolotang dalam konstesasi pemilu di kabupaten Sidrap Dalam ranah akademik akan memperkaya khasanah kajian ilmu politik khususnya pengembangan kajian ilmu politik kontemporer.

Manfaat praktis, Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk penelitian lain dalam mengembangkan, menelaah, dan mendalami kajian politik kontemporer terkait kekuatan politik masyarakat minoritas komunitas tolotang. Selain itu sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan dan memahami pasrtisipasi masyarakat adata dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pendekatan, teori, dan konsep yang digunakan dalam menganalisis kekuatan politik komunitas tolotang dalam kontestasi pemilu di Kab.Sidrap 2022 untuk selanjutnya menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini. Bab ini juga dijelaskan kekuatan politik pada komunitas tolotang, modal politik yang dimiliki komunitas tolotang sebagai teori, dan menguraikan penelitian terdahulu (literatur review).

2.1. Modalitas Dalam Kontestasi Pemilu

Dalam pemilihan umum yang terfokus pada pemilu legislatif merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilu secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Menurut Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa.

Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus.

Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan kedalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis

material tersebut. Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate.

Dengan Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan versi dunia sosial yang resmi. Pada abad ke-16 dan 17 istilah "capital" digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah "stock" dan istilah "capital" sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai join stock companies atau capital stock companies.

Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya

sebagian kecil nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “fixed capital” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “circulating capital” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi). Di dalam proses Pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan Pilkada manakala memiliki modalitas terbangun.

Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pemilu langsung, yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Calon legislatif itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar calon yang mampu mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai anggota legislatif terkhusus pada pemilu legislatif tingkat daerah yaitu DPRD Kabupaten Sidrap. Peluang terpilihnya merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada teori modal sosial, modal budaya memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam. Modalitas dalam kontestasi politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan aktor-aktor sosial politik dan

budaya untuk pemenangan pemilu calon legislatif. Berikut 4 (empat) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pemilu langsung, sebagai berikut :

2.1.1 Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat.

Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pemilu langsung, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut. Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (social network), sedangkan kelompok

kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut :

a. Robert Putnam (1993) : modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil tambahan).

b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan

kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk social capital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.

d. Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson (1982) menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan

Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik. Bahasan mengenai trust jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (social capital) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (high trust society).

Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (low trust society) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan ketiadaan kepercayaan (zero trust society). Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Teori modal sosial merupakan teori yang paling tegas, dapat diringkas dalam dua kata: soal hubungan. Dengan membangun

hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sendiri, atau dapat dicapai tetapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jejaring menjadi sumber daya, dapat dipandang sebagai modal (Field,2010:1).

Putnam, (2001) mengatakan modal sosial merupakan wujud dari masyarakat yang terorganisir, baik ditinjau dari jaringan kerja, norma, serta nilai kepercayaan, yang berperan dalam kerjasama dan tindakan yang bermanfaat. Secara khusus, Ia berpendapat bahwa lunturnya ikatan dalam keluarga dan masyarakat akan membawa dampak signifikan dalam kehidupan bersosial. Lebih jauh, George Rtzler, (2007) lunturnya ikatan dalam modal sosial cenderung diakibatkan oleh semakin menurunnya nilai kepercayaan yang ada. Selain itu modal sosial yang terbentuk mulai dari level kecil hingga ke populasi yang lebih luas. Kekuatan modal sosial ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan ekonomi dan politik. Sehingga dalam hal ini Putnam mengemukakan argumen bahwa modal sosial pada hakikatnya adalah jumlah kepercayaan yang tersedia dan merupakan modal utama yang menjadi ciri budaya politik masyarakat modern.

Sekaligus Bagi Putnam (1993 hal. 35; 1993), modal sosial mengacu pada 'ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi tindakan dan kerja sama untuk keuntungan bersama'. Putnam mengikuti keyakinan Coleman bahwa modal sosial adalah kualitas yang dapat menjadi fasilitator kerja sama antarpribadi. Dalam pandangan Putnam, ciri tersebut dapat dianggap sebagai sifat agregat sedemikian rupa sehingga dapat dibandingkan di berbagai kota, wilayah, dan bahkan negara. Definisi modal sosial yang diberikan oleh Putnam berfokus pada ciri-ciri organisasi sosial, dengan contoh-contoh jaringan, norma, dan kepercayaan yang diberikan sebagai ilustrasi. Definisi ini dengan jelas memposisikan modal sosial sebagai milik kolektif karena 'modal' berkaitan dengan organisasi sosial, yang memengaruhi tindakan individu, bukan properti individu yang menentukan tindakan mereka.

2.1.2 Modal Budaya

Modal budaya adalah satu konsep sosiologi yang telah mendapat popularitas yang meluas sejak ia mulai disuarakan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu dan JeanClaude Passeron pertama kali menggunakan istilah dalam "Cultural Reproduction dan Social Reproduction" (1973). modal budaya bertindak sebagai hubungan sosial dalam sistem pertukaran yang termasuk pengetahuan budaya

terkumpul yang memberikan kuasa dan status. Bourdieu menyatakan modal budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang melibatkan ilmu pendidikan, sosial dan intelektual.

Dengan ini Modal budaya merupakan pengetahuan atau selera yang bernilai secara budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya menjadi penentu kedudukan sosial seseorang karena seperti yang kita tahu, cita rasa ditentukan secara sosial. Modal budaya sendiri merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus. Modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendidikan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik pendidikan formal maupun warisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara efektif. Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- a. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya
- b. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi

- c. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas)
- d. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis.
- e. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk.

Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat diperoleh jika individu memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Bagi kebudayaan Indonesia, pemikiran Bourdieu memberikan manfaat signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat, karena modal budaya dan habitus memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya.

2.1.3 Modal Politik

Kandidat dalam pemilu memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pemilukada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-

orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang.

Pemilu sebagai arena kompetisi antar kandidat. Fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pemilu harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*).

Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat

menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009), mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik.

Dengan Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum. Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara. Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik

harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan.

Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pemilu secara langsung, karena itu dalam pemilu pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai (koalisi parpol) tidak terlalu menonjol. Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan karena Pemilu sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya.

Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Nurhasim,dkk, Elit politik dalam konteks lokal yaitu : “Elit Politik Lokal adalah mereka yang

memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”. Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan ataupun kedudukan sebagai kepala suatu komunitas.

2.1.4 Modal Ekonomi

Saat pemilu tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Pengertian modal

ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai.

Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya. Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan.

Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan

pemikiran yang jelas. Modal financial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

2.2 Kekuatan Politik Dalam Pemanfaatan Modalitas

Kekuasaan politik adalah gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk mencapai/mempertahankan tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “power” berasal dari kata aslinya, yang berarti tenaga yang dahsyat, kekuatan, kerja keras, usaha dan keunggulan. Dan "kekuatan" didefinisikan sebagai tingkat keseragaman yang diperlukan.⁴ Kekuatan politik ada dalam masyarakat, dan tujuannya adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan rencana terstruktur berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan adalah dengan mengikuti pemilihan umum. Untuk bertahan dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memenangkan suara rakyat dan mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu dalam kontestasi calon legislatif pada tahun 2024 pada wilayah Kabupaten Sidrap memanfaatkan modalitas yang dimiliki oleh calon sebagai kekuatan politik untuk menjadi salah satu kandidat yang ingin berkontestasi.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Balai Pustaka. 1991

2.3 Kontestasi

Kontestasi dalam Politik Menurut Gustaf Kusno (2013), secara sepintas istilah “kontestasi” itu nampak sah sebagai pengindonesiaan dari kata Inggris contestation. Namun demikian, hal tersebut sudah menyerap kata contestant menjadi “kontestan” yang menurut KBBI bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan dsb). Pengertian kontestasi menurut Oxford Dictionaries. Misalnya dalam kamus tersebut dikatakan bahwa kontestasi adalah tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat, misalnya kontestasi ideologis atas kebijakan sosial dan bahkan juga di dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Surbakti, 1992: 181).

Orang atau partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (representatif government) (Cholisin, dkk, 2006: 126). Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang 19 hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih.

2.4 Penelitian terdahulu (literatur review)

Pengertian penelitian terdahulu Menurut Hasibuan, (Zainal A. 2007) adalah berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literature review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Berikut karya ilmiah terlebih dahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

Penelitian dari Muh. Ibnu Mundzir menjelaskan juga tentang kelompok yang memiliki kekuatan politik dari Muhammadiyah di kecamatan bajeng kabupaten gowa juga menjelaskan bahwa Bentuk partisipasi politik yang terjadi yaitu bentuk Partisipasi Politik Konvensional, yaitu meliputi Ikut Serta dalam Kegiatan Pemilihan, bergabung di Partai Politik. Bentuk partisipasi politik tersebut. dapat dilihat dari Partisipasi politik yang ada di Kecamatan Bajeng cukup baik dengan berhasilnya kader Muhammadiyah dalam proses pemilihan Anggota legislatif pada tahun 2014 dan besarnya angka partisipasi pemilih yaitu sekitar 7,5%. Sedangkan bentuk lainnya yaitu Bergabungnya kader Muhammadiyah di Partai Politik merupakan

bentuk upayakader Muhammadiyah untuk terlibat dalam sistem, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kader Muhammadiyah dalam melakukan strategi politik cenderung diuntungkan oleh eksistensi Muhammadiyah di kecamatan Bajeng, pembauran Muhammadiyah di masyarakat begitu masif dan dirasakan langsung oleh masyarakat baik di sektor agama, kesehatan serta pendidikan membuat Muhammadiyah menjadi organisasi keagamaan yang sentral di masyarakat Bajeng.

Strategi yang dilakukan adalah dengan menjual visi misi, melibatkan pemuda, mengoptimalkan peran Muhammadiyah serta mengandalkan jaringan keluarga. Implikasi : Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam aktifitas politik menjadi hal penting, sebab kualitas kader yang telah diakui oleh masyarakat menumbuhkan harapan masyarakat/kader Muhammadiyah sebagai perwakilan mereka di masyarakat namun akan menjadi bomerang ketika para elit Muhammadiyah tersebut tidak menajalankan amanah mereka akan berdampak buruk terhadap citra kader tersebut.

Berbeda juga dengan penelitian dari Galik Satria Utomo mendeskripsikan tentang Relasi Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Pilkada di Mojokerto terkait peran partai politik pendukung calon kepala daerah dalam memberikan partisipasi dukungan kepada calon kepala daerah. Relasi kuasa pada Pilkada Mojokerto tidak jauh-jauh dari peran incumbent yang masih tetap ikut berkontestasi pada Pilkada, hal

ini jelas memiliki relasi kuasayang cukup kuat. Penelitian ini menarik untuk dikaji dan yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang berasal dari kelompok minoritas membentuk komunitas berdasarkan latar belakang kepercayaan lokal yaitu komunitas tolotang. Menurut dugaan sementara penulis Komunitas ini berada di tengah-tengah kelompok mayoritas beragama muslim tetapi memiliki potensi sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh dalambidang politik dalam hal ini memiliki kekuatan-kekuatan politik dalam pemilihan umum daerah di kabupaten sidrap tahun 2024. Peneliti akan lebih lanjut menganalisis kekuatan politik aktor di komunitas tolotang dan kekuatan politik kelembagaan atau secara kelompok komunitas tolotang.

2.5 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur logika sesuai dengan tema penelitian yang akan ditulis. Hal ini berasal dari rumusan masalah yang telah ditentukan kemudian dikaitkan dengan pendekatan, teori dan konsep. Calon Legislatif dengan kepemilikan modal sosial dengan modal budaya dapat membantu pembentukan habitus untuk siap bersaing di arena pertarungan politik yang sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan suara masyarakat pada kemenangan Pemilu Legislatif. Hubungan antara habitus, ranah, dan modal sosial serta modal budaya semua relevan dan saling bersinergi. Apabila ada salah satu dari ketiga hal ini hilang atau

tidak dimiliki oleh aktor maka akan sulit bertarung dalam ranah politik. Perlu ada usaha yang keras yang dilakukan oleh aktor dan tim strategi pemenangannya agar bisa memenangkan aktor dalam Pemilu Legislatif.

Sehingga Sumber daya ini akan menjadi pertarungan abadi aktor dalam setiap pemilihan kursi di Kabupaten Sidrap. Hal itu tetap yang menjadi faktor yang esensial dan penggabungan tiga unsur tadi akan lebih memudahkan aktor untuk menang dalam setiap pemilihan.

2.6 Skema pikir

